



**ANALISIS PENGARUH REALISASI APBD TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN
MENGUNAKAN *STATISTICAL MEDIATION ANALYSIS*
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

Tugas Akhir

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Studi Statistik Terapan dan Komputasi

oleh

Nama : Tutut Nurhidayah

NIM : 4112315013

Jurusan/Prodi : Matematika/Staterkom

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Semarang, 2 Juli 2018

METERAI
TEMPEL

KDDFAFF191805467

6000

Tutur Nurhidayah

NIM 4112315013

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul

Analisis Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan *Statistical Mediation Analysis* (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)

disusun oleh

Nama : Tutut Nurhidayah

NIM : 4112315013


telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Tugas Akhir FMIPA Universitas Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 2018.

Panitia:



Prof. D. Zaenuri S.E, M.Si, Akt
NIP. 196412231988031001


Sekretaris


Dr. Arief Agostunto, M.Si
NIP. 196807221993031005

Pembimbing /Penguji II


Putriaji Hendikawati, S.Si, M.Pd, M.Sc
NIP. 198208182006042001

Penguji I


Dr. Dr. Wardono, M.Si
NIP. 196202071986011001

MOTTO

1. "Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh" (Confusius).
2. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.
3. Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan.

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa mengiringi penulis dengan doa, cinta dan kasih sayang.
2. Kakak-kakak yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan untuk penulis.
3. Keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, kritik dan saran yang membantu penulisan tugas akhir ini.
4. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa untuk penulis.
5. Teman-teman Staterkom angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta rasa kekeluargaan.

ABSTRAK

Nurhidayah, Tutut. 2018. *Analisis Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan Statistical Mediation Analysis (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)*. Tugas Akhir, Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Putriaji Hendikawati, S.Si, M.Pd., M.Sc.

Kata kunci: Realisasi APBD, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

Kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan di negara berkembang, seringkali terhalang oleh kurangnya pemerataan antara daerah satu dengan daerah lain, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan faktor yang mendukung timbulnya kemiskinan. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. APBD diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki.

Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi. Data yang diambil kemudian diolah menggunakan analisis jalur dengan bantuan *software* LISREL. Variabel dalam penelitian ini adalah Realisasi APBD yang dibagi menjadi 4 (empat) variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pembangunan, selain itu juga terdapat variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 105 yang tergabung dalam 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data dari tahun 2014-2016.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat pengaruh langsung positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,28 dan terdapat pengaruh langsung DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,38. Sedangkan DAU dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tidak terdapat pengaruh langsung positif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan sebagai bentuk realisasi APBD tidak menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening variable* / variabel perantara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini merupakan syarat dalam meraih keahlian di bidang Statistik Terapan dan Komputasi. Semua hambatan dan tantangan dalam penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu pengalaman tersendiri bagi penulis.

Dalam mengerjakan dan menyusun tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, Bapak Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si., Akt.
3. Ketua Jurusan Matematika, Bapak Drs. Arief Agoestanto, M.Si.,
4. Ketua Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, Bapak Dr. Wardono, M.Si.,
5. Dosen pembimbing, Ibu Putriaji Hendikawati, S.Si, M.Pd., M.Sc yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Ayah dan Ibu tercinta, kakak dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian yang sangat besar kepada penulis.
7. Teman-teman Kos Lestari, terima kasih atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kalian berikan pada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Staterkom 2015 yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Pihak lain yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	9
1.2.1 Rumusan Masalah	9
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	12
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	20
2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	23
2.6 Belanja Pembangunan	24
2.7 Pertumbuhan Ekonomi	26
2.8 Kemiskinan	28

2.9	Uji Asumsi Klasik.....	32
2.10	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	36
2.11	<i>Linear Structural Relationship</i> (LISREL)	49
2.12	Kerangka Pemikiran	54
2.13	Hipotesis Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN		59
3.1	Variabel Penelitian.....	59
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	59
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	61
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	61
3.5	Metode Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		78
4.1	Hasil Penelitian	78
4.2	Pembahasan	97
BAB V PENUTUP.....		102
5.1	Simpulan	102
5.2	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN		108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tipe Regresi Ganda (Model Jalur satu).....	43
Gambar 2.2 Model Mediasi (Model Dua Jalur)	43
Gambar 2.3 Model Kompleks (Model Lebih dari Dua Jalur).....	44
Gambar 2.2 Jendela Program LISREL.....	50
Gambar 2.5 Submenu Program LISREL	50
Gambar 2.6 Editor Syntax Only	51
Gambar 2.7 Cel PRELIS Data	52
Gambar 2.8 Editor SIMPLIS Project	53
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran.....	57
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data	64
Gambar 3.2 Perintah Uji Normalitas.....	66
Gambar 3.3 Perintah Uji Kolmogorov-Smirnov	66
Gambar 3.4 Perintah Uji Multikolinearitas.....	68
Gambar 3.5 Perintah Uji Autokorelasi.....	69
Gambar 3.6 Perintah Uji Heterokedasitas	71
Gambar 3.7 Model Diagram Jalur Penelitian.....	72
Gambar 3.8 Tampilan Awal Program LISREL	72
Gambar 3.9 Submenu program LISREL.....	73
Gambar 3.10 Tampilan Prelis Data.....	73
Gambar 3.11 Import Data	74
Gambar 3.12 Tampilan Awal Lembar Kerja Path Diagram	74
Gambar 3.13 Import File Path Diagram.....	75
Gambar 3.14 Desain Path Diagram	76
Gambar 3.15 Syntax Simplis.....	76
Gambar 4.1 Hasil Output SPSS Uji Kolmogorov-Smirnov Persamaan Struktural 1	79
Gambar 4.2 Hasil Output SPSS Uji Linearitas Persamaan Struktural 1	80

Gambar 4.3 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas	
Persamaan Struktural 1	81
Gambar 4.4 Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas	
Persamaan Struktural 1	82
Gambar 4.5 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi	
Persamaan Struktural 1	82
Gambar 4.6 Hasil Output SPSS Uji Kolmogorov-Smirnov	
Persamaan Struktural 2	83
Gambar 4.7 Hasil Output SPSS Uji Linearitas	
Persamaan Struktural 2	84
Gambar 4.8 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas	
Persamaan Struktural 2	84
Gambar 4.9 Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas	
Persamaan Struktural 2	85
Gambar 4.10 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi	
Persamaan Struktural 2	86
Gambar 4.11 Hasil Output Diagram Jalur.....	87
Gambar 4.12 Output LISREL Persamaan Struktural 1	88
Gambar 4.13 Output LISREL Persamaan Struktural 2.....	89
Gambar 4.14 Hasil Output <i>Goodness of Fit Statistics</i>	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi.....	36
Tabel 2.2 Perbandingan analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis jalur.....	38
Tabel 4.1 Korelasi antar Variabel Penelitian	96
Tabel 4.2 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian	109
Lampiran 2	Tampilan Output Uji Asumsi Klasik Persamaan Struktural 1	114
Lampiran 3	Tampilan Output Uji Asumsi Klasik Persamaan Struktural 2	116
Lampiran 4	Tampilan Output Analisis Jalur Menggunakan Program LISREL	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Analisis statistik merupakan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat dalam menjawab permasalahan statistik. Sebelum melakukan penelitian, perlu adanya perencanaan yang baik dalam menentukan metode analisis yang akan diterapkan untuk menganalisis data. Secara umum dalam memilih metode analisis yang digunakan dalam penelitian, khususnya dalam melakukan analisis data, perlu memerhatikan jenis data (termasuk dalam jenis data nominal, ordinal, interval atau rasio), variabel penelitian dan bentuk hipotesis yang digunakan (Gunawan,2016:15).

Analisis jalur (*path analysis*) merupakan salah satu dalam metode analisis statistik. Menurut Rutterford (1993) menyatakan “analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat baik secara langsung maupun tidak langsung”. Sedangkan menurut Mawarni,dkk (2013:80-90) menyatakan analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausal antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian hubungan kausal tersebut didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa variabel yang dikaji memiliki hubungan secara kausal.

Analisis jalur dapat digunakan untuk menganalisis pola hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Pengaruh-pengaruh itu dijelaskan sebagai koefisien jalur (*path coefficients*) yang merupakan koefisien regresi yang telah dibakukan yaitu β (*beta*). Secara teoritik, Analisis jalur menyatakan hubungan variabel eksogen dengan variabel endogen yang bersifat *recursive*. Hubungan *recursive* yang dimaksud adalah variabel eksogen berhubungan dengan variabel endogen melalui variabel eksogen yang lain.

Menurut Sarwono (2012) analisis jalur memberikan keuntungan antara lain kemampuan dalam menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual, kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator/perantara, dan kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan kausal pada semua variabel dalam model. Sedangkan beberapa kelemahan dari analisis jalur antara lain tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran, analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten, analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear ganda sehingga semua asumsi-asumsi dalam regresi linear ganda harus terpenuhi, dan hubungan kausal dalam model hanya bersifat searah, tidak bersifat timbal balik (*reciprocal*).

Jadi secara umum analisis jalur dapat diartikan sebagai sebuah estimasi koefisien dari seperangkat persamaan struktural linear yang menggambarkan hubungan sebab akibat yang telah dihipotesiskan peneliti. Pola hubungan antar variabel dalam analisis jalur dapat ditampilkan dalam bentuk diagram jalur (*path*

diagram). Diagram jalur digunakan untuk membantu mengkonseptualisasikan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Ada beberapa model dalam analisis jalur mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang lebih rumit dan dibedakan menjadi tiga model. Model pertama dan paling sederhana adalah model satu jalur (tipe regresi berganda). Model ini menggunakan dua atau lebih variabel eksogen dan satu variabel endogen. Model kedua, adalah model dua jalur (model mediasi/ *Statistical Mediation Analysis*). Model kedua ini menggunakan variabel mediasi/perantara dimana variabel mediasi/perantara tersebut memodifikasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model ketiga, model lebih dari dua jalur (model kompleks). Model ketiga ini merupakan model yang lebih kompleks yaitu terdiri dari lebih dari satu variabel eksogen dan lebih dari satu variabel endogen yang melewati variabel perantara/mediasi.

Penelitian-penelitian di bidang ilmu sosial, ekonomi, bisnis, pendidikan dan lainnya, menjelaskan tidak selamanya pengaruh suatu variabel didominasi oleh satu variabel eksogen atau beberapa variabel eksogen secara langsung. Namun seringkali terjadi pengaruh variabel mediasi/perantara (*intervening variable*) yang menerima pengaruh dari beberapa variabel eksogen yang kemudian secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi variabel endogen. Seperti dalam penelitian Coelho (2012), hasil analisis jalur menunjukkan bahwa variabel eksogen yaitu kepuasan gaji dapat berpengaruh secara langsung pada keinginan pegawai untuk pindah dan dapat pula berpengaruh secara tidak langsung yaitu dari kepuasan gaji ke konflik pekerjaan keluarga (sebagai *intervening variable*)

menuju ke variabel keinginan pegawai untuk pindah sebagai variabel endogen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik pekerjaan keluarga menjadi variabel mediasi antara pengaruh kepuasan gaji terhadap keinginan pegawai untuk pindah.

Kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang ditandai dengan adanya suatu kenaikan dari pendapatan total serta kenaikan pendapatan perkapita yang dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Pertumbuhan yang ingin diwujudkan melalui pembangunan merupakan suatu bentuk realisasi potensi yang dimiliki suatu negara dan diharapkan dapat mencakup perubahan-perubahan penting dalam berbagai sektor. Seringkali pembangunan di negara berkembang terhalang oleh kurangnya pemerataan di satu daerah dengan daerah yang lain dalam suatu negara sehingga berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung ke bawah dan terjadinya kesenjangan sosial. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja merupakan faktor yang mendukung timbulnya kemiskinan. Pemerintah dituntut

untuk memikirkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Aisyah (2004), Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi dimana penduduk memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan tentang otonomi daerah secara efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2002, dengan ditetapkannya peraturan tersebut pemerintah daerah mendapatkan kewenangan riil yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri, dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memicu perkembangan kegiatan perekonomian daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. APBD diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terbagi ke dalam pendapatan dan belanja. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Terduga. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

Menurut Lin dan Liu, sebagaimana dikutip oleh Adi (2006) menunjukkan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain belanja pembangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Setiawati (2007) adanya kenaikan PAD akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas pada sektor-sektor yang

terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya.

Kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Ketiga dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah.

Perbedaan PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan antar daerah tidak sama. Sehingga penulis ingin menguji pengaruh secara langsung dan tidak langsung realisasi APBD yaitu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis jalur model mediasi (*Statistical Mediation Analysis*).

Saat ini software statistik analisis data relatif mudah diperoleh seiring dengan pesatnya teknologi informasi di bidang software analisis data khususnya penelitian kuantitatif, seperti *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*, *Minitab*, *AMOS*, *Linear Structural Relationship (LISREL)*, *EViews*, *TETRAD for Causal Model and Statistical Data* dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan software LISREL dalam mengestimasi koefisien dari seperangkat persamaan struktural linear yang menggambarkan hubungan sebab akibat yang dihipotesiskan. LISREL mampu memberikan estimasi dan parameter-parameter yang berkualitas tinggi jika dibandingkan dengan software statistik lain. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki software LISREL, maka software ini sering digunakan dalam penelitian sosial, kedokteran, teknologi informasi, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain (Riadi,2013:1).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menguji pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan sebagai bentuk dari Realisasi APBD secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan analisis jalur model II atau model mediasi (*Statistical Mediation Analysis*) menggunakan software *Linear Structural Relationship (LISREL)*. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang “Analisis Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan *Statistical Mediation Analysis* (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016)”.

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh secara langsung realisasi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung realisasi APBD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening variable* pada kabupaten/kota di Jawa Tengah?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada variabel eksogen awal yang digunakan adalah PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangun sebagai bentuk dari realisasi perhitungan APBD pemerintah Jawa Tengah tahun anggaran 2014-2016. Model analisis jalur yang digunakan adalah model II atau model mediasi (*Statistical Mediation Analysis*) yang diharapkan dapat menjelaskan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel yang diteliti berdasarkan model jalur yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh secara langsung realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.
2. Menguji pengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Menguji pengaruh secara tidak langsung realisasi APBD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening variable* pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan di Statistika Terapan dan Komputasi dan memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai penerapan ilmu statistika itu sangat luas.

2. Bagi Jurusan

Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca, serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

3. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan referensi yang diharapkan dapat membantu dalam merencanakan APBD Jawa Tengah agar lebih memaksimalkan dalam perencanaan dan realisasi APBD di tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal tugas akhir terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan keaslian tulisan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

Bagian isi tugas akhir terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan tugas akhir ini. Bab II terdiri dari landasaan teori. Landasan teori berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, meliputi Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Analisis Jalur dan Software LISREL, kerangka pemikiran dan Hipotesis Penelitian. Bab III terdiri dari metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis data menggunakan program LISREL. Bab IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang semua hal yang diperoleh setelah melakukan analisis dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir. Bab V terdiri dari penutup, penutup berisi tentang simpulan dan saran.

Bagian akhir dari Tugas Akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' - 111°30' Bujur Timur dengan batas sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan D.I. Yogyakarta, sebelah barat Provinsi Jawa Barat dan sebelah timur Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 565 Kecamatan serta 8.568 desa. Suhu rata-rata di Jawa Tengah adalah antara 18-28 derajat Celcius dan kelembaban relatif bervariasi antara 73-94 persen. Curah hujan tertinggi tahunan rata-rata 3.990 mm dengan 195 hari hujan tercatat di Salatiga.

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah dimana mata pencaharian di bidang ini hampir digeluti separuh dari angkatan kerja yang terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan merupakan daerah penghasil kayu jati. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di

Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan.

2.1.2 Kondisi Demografi Provinsi Jawa Tengah

Proyeksi Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 untuk tahun 2017 sebanyak 34.257.865 jiwa atau sekitar 13,25 % dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16.988.093 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 17.269.772 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah 1.045, 32.

Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedangkan pertumbuhan penduduk terendah berada di Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Mata pencaharian paling banyak adalah di

sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan sektor perdagangan (20,91%), sektor industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (UU Keuangan Negara, 2002).

Menurut Halim (2004) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur yaitu rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas daerah tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan daerah, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

2.2.2 Struktur dalam APBD

Laporan APBD yang memakai format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut ini penjelasan dari 3 (tiga) bagian laporan APBD.

1. Pendapatan

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja

Belanja digolongkan menjadi 4 kategori yaitu belanja aparatur daerah (terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan), belanja pelayanan publik (terdiri dari belanja administrasi umum belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal), belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak disangka.

3. Pembiayaan

Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu penerimaan pinjaman dan obligasi hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber

pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2004).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara itu menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 79 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2004) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatan. Adapun klasifikasi PAD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut.

2.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “pajak daerah merupakan iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku”.

Pajak daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan dan khusus disediakan bagi orang yang menginap/istirahat dan memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya, dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan merupakan tempat mengonsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan pihak restoran dengan dipungut biaya, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pemanfaatan Galian Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan orang pribadi

atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Berikut uraian terkait pengelompokan retribusi daerah.

- (1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.
- (3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah maka daerah tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah berkesempatan untuk mengelola kekayaan daerahnya semaksimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.3.4 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan

pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dalam dana perimbangan dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsi yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat “*block grant*” yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan minimal 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN). PDN yang akan dibagikan kepada daerah adalah PDN netto yaitu PDN bruto dikurangi dengan penerimaan yang telah dibagikan termasuk dana reboisasi (Widjaja, 2002).

Dalam rangka terciptanya keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat

pendapatan masyarakat di daerah sehingga pemerataan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat dipenuhi.

2.4.1 Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN dan pengalokasiannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Berikut ini tahapan-tahapan perhitungan Dana Alokasi Umum.

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Pada tahapan ini Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan hasil perhitungan DAU.

2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Berbeda dengan DAU, kewenangan dalam alokasi DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pengalokasian DAK dimaksudkan kepada daerah tertentu berdasarkan usul kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah kepada menteri Teknis, sedangkan pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis/Instansi yang terkait yang membidangi perencanaan pembangunan

nasional. Untuk memperoleh DAK, daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal 10% dari total yang diajukan yang disediakan dari APBD.

Kebutuhan khusus yang dimaksud diatas adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komponen atau prioritas nasional. Sektor atau kegiatan yang tidak dibiayai dari DAK adalah biaya administrasi, biaya persiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenis.

DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) bulan. Jumlah DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN didasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2.6 Belanja Pembangunan

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa “Belanja Pembangunan atau belanja modal merupakan belanja daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum”. Berdasarkan

Keputusan Menteri No. 29 Tahun 2002 belanja pembangunan dibagi menjadi:

- a. Belanja Pelayanan Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
- b. Belanja Aparatur Daerah yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan oleh aparatur.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, “Belanja Pembangunan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya”. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi keputusan dalam pengalokasian belanja daerah termasuk pengalokasian belanja modal dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel non keuangan dan variabel keuangan. Variabel non keuangan meliputi: kebijakan pemerintahan dan kondisi makroekonomi, sedangkan variabel keuangan meliputi ukuran-ukuran dan jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya.

2.7 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets dalam Jhingan (2000) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologis sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Sedangkan Sukirno (1991) menyatakan “pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricarado, Thomas Robert Makthus dan John Stuart Mill menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang memengaruhi ekonomi suatu negara yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta kemajuan teknologi.

Selain pengertian pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah unit barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kegunaan dari PDRB antara lain untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, dan sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis khususnya

persamaan penjualan. Rumus menghitung Produk Domestik Regional Bruto adalah:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \% \quad (2.1)$$

Keterangan :

PDRB_t : Nilai PDRB pada tahun tertentu.

PDRB_{t-1} : Nilai PDRB tahun sebelumnya.

2.8 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Suryawati (2005) Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

2.8.1 Definisi Kemiskinan Secara Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2005). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

2.8.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Berdasarkan sudut pandang

ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan (Suryawati, 2005). Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat

di daerah tersebut akan menurun. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat.

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja. Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

2.8.3 Perhitungan Persentase Penduduk Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berikut ini adalah rumus perhitungan persentase penduduk miskin.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad (2.2)$$

Keterangan :

$\alpha = 1$, n = jumlah penduduk

Z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; $i = 1,2,3,\dots,q$, $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

2.9 Uji Asumsi Klasik

Beberapa formula statistik disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Formula tersebut dapat menggambarkan sebuah fenomena ketika asumsi-asumsi tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, jika peneliti

menggunakan suatu formula tertentu maka diharapkan data penelitian dapat sesuai dengan asumsi sebuah formula (Gunawan,2016:92).

Menurut Hasan (2005) menyatakan dalam penggunaan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang dapat menghasilkan estimator yang tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat dikatakan mendekati kenyataan dan juga lebih akurat. Asumsi tersebut dikenal dengan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

2.9.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model struktural, variabel eksogen dan variabel endogen keduanya mempunyai data mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapatkan (*observed*) dengan distribusi data normal (*expected*). Cara mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas yang dilakukan dengan Uji *Kolmogorov Smirnov* dapat menggunakan program analisis statistik *IBM SPSS Statistic 20*. Kriteria pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS,, Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal (Sudarmanto, 2005).

2.9.2 Uji linearitas

Sebagian besar rumus statistika menghendaki adanya hubungan linear antar variabel. Hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan peningkatan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan antar masing-masing variabel penelitian. Dalam menguji linearitas dapat menggunakan scatter diagram atau *compare means* dengan bantuan program analisis statistik *IBM SPSS Statistics 20*.

2.9.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas (eksogen). Jika antar variabel eksogen berkorelasi dengan sempurna disebut multikolinearitas sempurna yang berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak dapat digunakan. Indikator untuk mendeteksi

adanya multikolinearitas adalah dengan menguji asumsi tersebut dengan uji korelasi antar variabel bebas dengan matriks korelasi.

Menurut Ghozali (2005), ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF berada pada $1,0 < VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $< 1,0$. Pengujian dapat dilakukan dengan bantuan program analisis *IBM Statistics 20*.

2.9.4 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED) dengan residualnya (*SRESID). Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah variabel terikat yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di *studentized*. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan adanya heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

2.9.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menuji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan. Autokorelasi berarti terdapat korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Terdapat beberapa cara untuk menghitung autokorelasi dalam suatu model regresi antara lain metode grafik dan uji *Durbin-Watson*.

Menurut Gunawan (2016) kriteria pengujian untuk mendeteksi adanya autokorelasi ditampilkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi

Kriteria Durbin-Watson	Simpulan
<1,10	Ada Autokorelasi
1,10 s.d 1,54	Tanpa Simpulan
1,55 s.d 2,46	Tidak Ada Autokorelasi
2,47 s.d 2,90	Tanpa Simpulan
>2,91	Ada Autokorelasi

2.10 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

2.10.1 Pengertian Analisis Jalur

Analisis jalur (*path analysis*) dikembangkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934. Tujuan dari analisis jalur adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari beberapa variabel sebagai variabel penyebab, terhadap beberapa variabel lainnya sebagai variabel akibat. Hubungan antarvariabel dalam analisis jalur ada 2 (dua) yaitu (1) pengaruh langsung, biasanya digambarkan dengan panah satu arah dari satu variabel

ke variabel lainnya; dan (2) pengaruh tidak langsung, digambarkan dengan panah satu arah pada satu variabel ke variabel lain, kemudian dari variabel lain panah satu arah ke variabel berikutnya.

Analisis jalur digunakan untuk menemukan penjelasan mengenai pola-pola hubungan langsung dan tidak langsung dari suatu model kausal yang disusun berdasarkan pertimbangan teoritis dan pengetahuan peneliti. Secara matematis, analisis jalur tidak lain adalah analisis regresi berganda terhadap data yang dibakukan. Analisis jalur mendasarkan diri pada model hubungan antarvariabel yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penentuan model didasarkan pada hipotesis mengenai berbagai variabel yang diamati (Winarsunu, 2002:279).

Hal ini dipertegas oleh Garson (2003) yang menyatakan analisis jalur merupakan model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Tabel 2.2 menampilkan perbandingan analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis jalur.

Tabel 2.2 Perbandingan analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis jalur.

Analisis Korelasi	Analisis Regresi	Analisis Jalur
Hubungan Asosiasi	Hubungan kausalitas	Hubungan kausalitas
Mengetahui besar hubungan	Mengestimasi nilai Y	Mengetahui besar pengaruh
Variabel independen (bebas) dan dependen (terikat)	Variabel prediktor (independen/bebas dan dependen/terikat)	Variabel eksogen (independen/bebas) dan variabel endogen (dependen / terikat)
Hanya bisa mengetahui besarnya hubungan	Hanya mengetahui pengaruh secara simultan, tidak bisa diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung	Bisa mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung
Mengukur variabel yang langsung bisa diukur	Yang diukur adalah variabel yang terukur saja	Yang diukur adalah variabel laten

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis jalur adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel eksogen (bebas) dengan variabel endogen (terikat) melalui perantara variabel eksogen lain. Artinya hubungan dua variabel dapat terjadi secara langsung dan dapat juga terjadi secara tidak langsung melalui variabel mediasi/perantara. Analisis jalur juga dapat menghitung efek total dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Efek total adalah gabungan dari efek langsung dan tidak langsung. Hal ini dipertegas oleh Ridwan dan Kuncoro (2007) yang mengemukakan manfaat dari analisis jalur yaitu: (1) menjelaskan (*explanation*) terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti, (2) memprediksi nilai variabel endogen (Y) berdasarkan nilai variabel eksogen (X), (3) faktor determinan yaitu penentuan variabel eksogen dapat digunakan untuk menelusuri

mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variabel ekseogen (X) terhadap variabel endogen (Y); dan (4) pengujian model menggunakan *theory trimming* baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada ataupun pengembangan konsep baru.

2.10.2 Konsep dan Istilah dalam Analisis Jalur

Berdasarkan pada pembahasan di sub bab sebelumnya, berikut ini diuraikan konsep dan istilah yang digunakan dalam analisis jalur.

1. Model jalur, yaitu suatu diagram yang menghubungkan antar variabel eksogen, perantara dan endogen. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Anak panah-anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab-akibat antar variabel-variabel eksogen atau perantara dengan satu atau lebih variabel endogen sedangkan anak panah ganda menunjukkan korelasi antara variabel-variabel eksogen.
2. Variabel analisis. Analisis jalur tidak menggunakan istilah variabel bebas dan terikat. Sebagaimana gantinya menggunakan istilah variabel eksogen (bebas) dan variabel endogen (terikat).
3. Variabel eksogen. Variabel-variabel eksogen dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju kearahnya, kecuali pada bagian kesalahan pengukuran (*residual*). Jika antar variabel eksogen dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut.

4. Variabel endogen. Variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalamnya ialah mencakup semua variabel perantara dan terikat. Variabel perantara (sebagai variabel endogen) mempunyai anak panah yang menuju kearahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedangkan variabel endogen hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya.
5. Koefisien jalur, adalah koefisien regresi standar atau disebut *beta*, yaitu menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua atau lebih variabel eksogen, maka koefisien-koefisien jalurnya merupakan koefisien-koefisien regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dengan menggunakan data yang sudah di standarkan atau matriks korelasi sudah dimasukkan.
6. Variabel-variabel eksogen yang dikorelasikan. Jika semua variabel eksogen dikorelasikan, maka sebagai penanda hubungannya ialah anak panah dengan dua kepala yang dihubungkan diantara variabel-variabel dengan koefisien korelasinya.
7. Istilah gangguan. Istilah kesalahan residual yang secara teknis disebut sebagai gangguan atau *residue* mencerminkan adanya varians yang tidak dapat diterangkan atau pengaruh dari semua variabel yang tidak diukur ditambah dengan kesalahan pengukuran.

8. Efek dekomposisi. Koefisien-koefisien jalur dapat digunakan untuk menguraikan korelasi-korelasi dalam suatu model ke dalam pengaruh langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan jalur langsung dan tidak langsung yang direfleksikan dengan anak panah-anak panah dalam suatu model tertentu. Hal ini didasarkan pada aturan dalam suatu sistem linear, maka pengaruh penyebab total suatu variabel X terhadap Y adalah jumlah semua nilai jalur dari X ke Y.
9. Signifikansi dalam model keselarasan dalam jalur. Untuk melakukan pengujian koefisien-koefisien jalur secara individual, peneliti dapat menggunakan uji t atau uji F dari angka-angka keluaran regresi. Sedangkan untuk menguji model dengan semua jalurnya, peneliti dapat menggunakan uji keselarasan dari program. Jika suatu model sudah benar, diantaranya mencakup semua variabel yang sesuai, maka jumlah nilai-nilai dari X ke Y akan sama dengan koefisien regresi untuk Y yang diprediksikan didasarkan pada X, yaitu untuk data yang sudah distandarisasi dimana koefisien regresi sederhana sama dengan koefisien korelasi, maka jumlah semua koefisien (standar) akan sama dengan koefisien korelasi.
10. Model *recursive*, model penyebab yang mempunyai satu arah. Tidak ada arah membalik dan tidak ada pengaruh sebab-akibat (*reciprocal*). Dalam model ini satu variabel tidak dapat berfungsi sebagai penyebab dan akibat dalam waktu yang bersamaan.

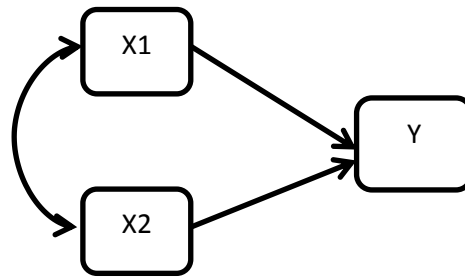
11. Model *Nonrecursive*. Model penyebab dengan disertai arah yang membalik atau adanya pengaruh sebab-akibat (*reciprocal*).
12. *Direct Effect*, yaitu pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur dari suatu variabel ke variabel lain.
13. *Indirect Effect*, yaitu urutan jalur melalui satu atau lebih variabel perantara.
14. *Total Effect*, yaitu urutan jalur dari variabel yang mempengaruhi dan perantara ke arah variabel yang diukur.
15. Pengaruh gabungan, yaitu pengaruh dari semua variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap variabel yang akan diukur.

2.10.3 Model-Model Analisis Jalur

Model analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung seperangkat variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat). Alasan penelitian menggunakan analisis jalur adalah secara teoritik hubungan variabel eksogen terhadap variabel endogen bersifat *recursive* dan hubungan variabel eksogen dengan variabel endogen cenderung linear. Berikut ini diuraikan model-model jalur mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang lebih rumit.

1. Tipe Regresi Ganda (Model Satu Jalur)

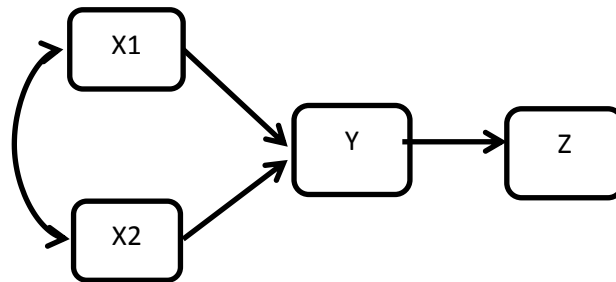
Model pertama merupakan pengembangan regresi berganda yaitu menggunakan dua variabel eksogenus (X_1 dan X_2) dan satu variabel endogen (Y). Model ini merupakan model satu jalur. Model di ilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Tipe Regresi Ganda (Model Jalur satu)

2. Model Mediasi (Model Dua Jalur)

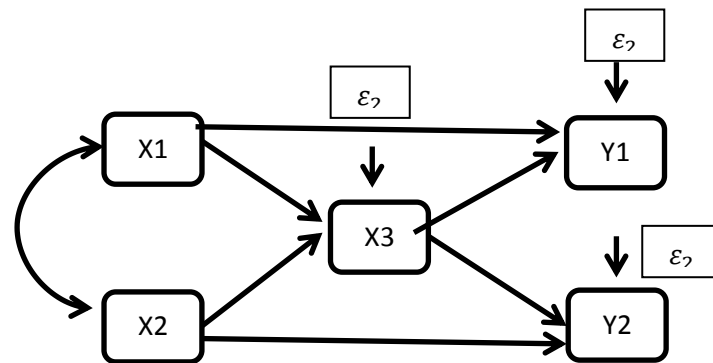
Model kedua adalah model mediasi atau perantara, dimana variabel endogen Y memodifikasi pengaruh variabel eksogen X terhadap variabel endogen Z. Model mediasi di ilustrasikan pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Model Mediasi (Model Dua Jalur)

3. Model Kompleks (Model Lebih dari Dua Jalur)

Model ketiga ini merupakan model yang lebih kompleks, yaitu variabel X1 secara langsung mempengaruhi variabel Y2, melalui variabel X2 secara langsung mempengaruhi Y2, dan melalui variabel X3 secara tidak langsung mempengaruhi Y2, sementara itu variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Model Kompleks diilustrasikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Model Kompleks (Model Lebih dari Dua Jalur)

2.10.4 Prinsip-Prinsip Dasar Analisis Jalur

Sebelum melakukan analisis jalur hendaknya memahami prinsip-prinsip dasar seperti dikemukakan oleh Jonathan Sawono seperti berikut.

1. Adanya linearitas (*linearity*). Hubungan antar variabel yang bersifat linear.
2. Adanya aditifitas (*additivity*) artinya tidak terdapat efek-efek interaksi.
3. Data berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai tipe data interval.
4. Terdapat ukuran sampel yang memadai. Sebaiknya diatas 100 sampel.
5. Semua variabel residual (yang tidak diukur) tidak berkorelasi dengan salah satu variabel-variabel dalam model.
6. Semua variabel residual tidak berkorelasi dengan semua variabel endogen dalam model. Jika terdapat korelasi maka hasil regresi menjadi tidak tepat untuk mengestimasi parameter-parameter jalur.
7. Multikolinearitas yang rendah. Artinya ada dua atau lebih variabel eksogen yang mempunyai hubungan sangat tinggi. Jika terjadi multikolinearitas maka akan mendapatkan standar eror yang besar dari

koefisien beta yang digunakan untuk menghasilkan varian dalam melakukan analisis korelasi secara parsial.

8. Adanya *recursivitas*. Semua anak panah memiliki satu arah, tidak terjadi pemutaran kembali.
9. Spesifikasi model diperlukan untuk menginterpretasi koefisien-koefisien jalur. Kesalahan spesifikasi terjadi ketika variabel eksogen dikeluarkan dari model. Semua koefisien jalur akan merefleksikan kovarian bersama dengan semua variabel yang tidak diukur dan tidak akan dapat diinterpretasikan secara tepat dalam kaitannya dengan pengaruh langsung maupun tidak langsung.
10. Terdapat masukan korelasi yang sesuai.
11. Sampel homogen, digunakan untuk perhitungan regresi dalam model jalur.
12. Asumsi analisis jalur mengikuti asumsi umum regresi linear.

2.10.5 Tahapan Analisis Jalur

Setelah memahami prinsip-prinsip dasar tentang analisis jalur diatas, langkah berikutnya adalah tahapan dalam melakukan analisis jalur. Berikut tahapan-tahapan analisis jalur.

1. Merancang model diagram jalur didasarkan pada teori.

Langkah ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural sebelum dilakukan estimasi. Dalam konteks analisis jalur, diagram jalur ini diformulasikan berdasarkan suatu teori yang kuat atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini persamaan struktural analisis jalur secara umum.

$$Z_y = p_{y1}Z_1 + p_{y2}Z_2 + p_{y3}Z_3 + \dots + p_{yi}Z_i + \varepsilon_i \quad (2.3)$$

2. Menentukan persamaan struktural

Setelah model diagram jalur terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan struktural dalam bentuk skor baku.

3. Menghitung matriks korelasi antarvariabel

Formula untuk menghitung koefisien korelasi yang dicari adalah menggunakan *Product Moment Coefficient* dari Karl Pearson. Alasan penggunaan teknik koefisien korelasi *Product Moment Coefficient* karena variabel-variabel dalam analisis jalur memiliki tipe data interval, formulasinya adalah:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

4. Menentukan koefisien masing-masing jalur

Setelah mengetahui persamaan struktural dan menghitung matriks korelasi, selanjutnya adalah menentukan koefisien masing-masing jalur.

5. Uji signifikansi koefisien pengaruh P_{xy}

Setelah koefisien yang mempengaruhi masing-masing jalur P_{xy} diketahui, maka koefisien pengaruh ini perlu di uji signifikansinya.

Untuk menguji signifikansi masing-masing jalur dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t = \frac{p_{x_i x_i}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{xy})CR_{ii}}{n-k-1}}}$$

Keterangan :

t = nilai t hitung setiap koefisien jalur

p_x = koefisien pengaruh

- R^2_{xy} = koefisien determinasi
 CR_{ij} = satuan matriks kolo 1 baris 1
 n = jumlah pengamatan
 k = jumlah variabel eksogen pada substruktural

Menghitung matriks invers korelasi variabel eksogen dengan rumus

$$R_1^{-1} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_k \\ CR_{11} & CR_{12} & \dots & CR_{1k} \\ & CR_{22} & \dots & CR_{2k} \\ & & \dots & \dots \\ & & & CR_{kk} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Selanjutnya pengaruh secara simultan variabel eksogen terhadap variabel endogen pada persamaan jalur substruktural dengan menggunakan rumus

$$R^2_{x_u(x_1, x_2, \dots, x_k)} = \rho_{x_u x_1} \quad \rho_{x_u x_2} \quad \dots \quad \rho_{x_u x_k} \begin{bmatrix} r_{x_u x_1} \\ r_{x_u x_2} \\ \dots \\ r_{x_u x_k} \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

6. Menentukan faktor residul ε_i

Berdasarkan koefisien determinasinya, dapat diidentifikasi faktor residul atau *error variance*, yaitu besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti $(p_{xk} \cdot \varepsilon_i)^2$ terhadap variabel endogen sebagaimana dinyatakan dalam persamaan struktural. Besar pengaruh variabel lain didefinisikan sebagai berikut.

$$(p_Y \varepsilon_i)^2 = 1 - R^2_{YXk} \quad (2.8)$$

7. Uji kesesuaian model

Uji kesesuaian model dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian (*fit*) dengan data atau tidak. Suatu model dikatakan sesuai apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi. Terdapat hipotesis untuk menyatakan matriks korelasi yaitu:

$H_0: R \neq R(\emptyset)$: matriks korelasi sampel berbeda dengan matriks korelasi estimasi.

$H_1: R = R(\emptyset)$: matriks korelasi sampel sama dengan matriks korelasi estimasi.

Formula untuk menguji kesesuaian model dapat dihitung menggunakan rumus

$$Q = \frac{1-R_m^2}{1-M}, \text{ dimana } R_m^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \quad (2.9)$$

keterangan :

jika $Q = 1$, maka mengindikasikan model fit sempurna

$M = R_m^2$ jika koefisien jalur semuanya signifikan

8. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Pada dasarnya mengestimasi koefisien yang mempengaruhi dalam konteks analisis jalur dan bukan hanya menganalisis pengaruh langsung (*Direct Caussal Effect/DCE*), tetapi juga menganalisis pengaruh tidak langsung (*Indirect Caussal Effect/ICE*), dan pengaruh total (*Total Caussal Effect/TCE*).

Pengaruh langsung (DCE) adalah ukuran pengaruh yang tidak dimediasi oleh variabel lain dalam suatu model atau sensitivitas perubahan X terhadap Y, dimana semua faktor lain dalam analisis dibuat *fix*. Sedangkan pengaruh tidak langsung (ICE) adalah ukuran perubahan dimana variabel terikat berubah melalui variabel mediator apabila variabel bebas dibuat *fix*. Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Dengan demikian rumus untuk menghitung pengaruh total adalah:

$$\text{TCE} = \text{DCE} + \text{ICE}$$

Keterangan :

TCE : Total Caussal Effect (Pengaruh Total)

DCE : Direct Caussal Effect (Pengaruh Langsung)

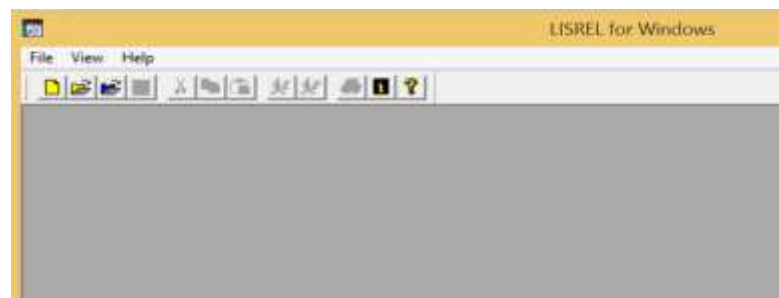
ICE : Indirect Caussal Effect (Pengaruh Tidak Langsung)

2.11 Program LISREL

Program LISREL (*Linear Structural Relationship*) merupakan software pintar yang dikembangkan oleh Karl Joreskog dan Dag Sorbom dari Uppsala University. Software ini terus mengalami pengembangan sejak 1970, namun baru dipublikasikan pada tahun 1989 oleh *Scientific Software International* (SSI) yang diberi label *LISREL 7: A Guide to the Program and Application* (Joreskog dan Sorbon). Pada dasarnya LISREL merupakan software pintar yang digunakan secara khusus untuk model persamaan struktur (*Structural Equation Modeling*) atau disingkat SEM. SEM merupakan software yang menggabungkan pendekatan analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur secara simultan.

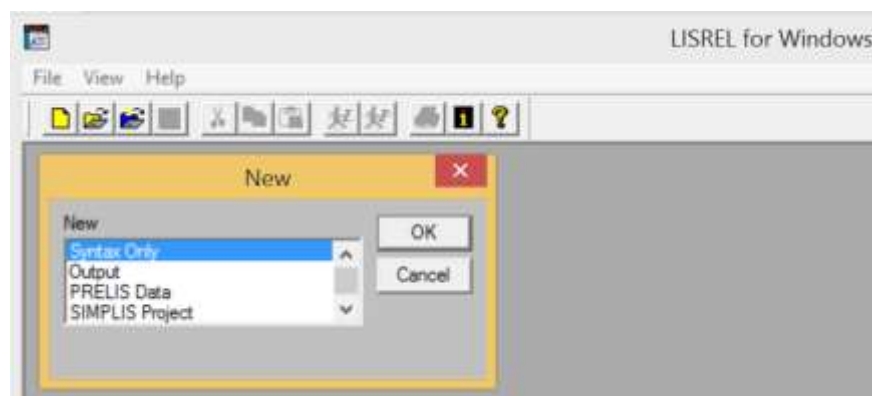
Ketika ingin menjalankan program LISREL, sebelumnya dipastikan terlebih dahulu bahwa komputer atau laptop sudah terinstall aplikasi LISREL. Langkah-langkah untuk memulai program LISREL adalah

- 1) Klik start → klik All Program → klik LISREL 8.8 (student)
- 2) Akan muncul jendela muka seperti Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Jendela Program LISREL

- 3) Jendela awal LISREL terdiri dari menu File, View, dan Help.
- 4) Selanjutnya untuk membuat lembar kerja baru, maka klik File → New, maka akan tampil submenu pilihan syntax only , PRELIS Data, SIMPLIS Project, PRELIS Project, dan Path Diagram seperti pada Gambar 2.5.



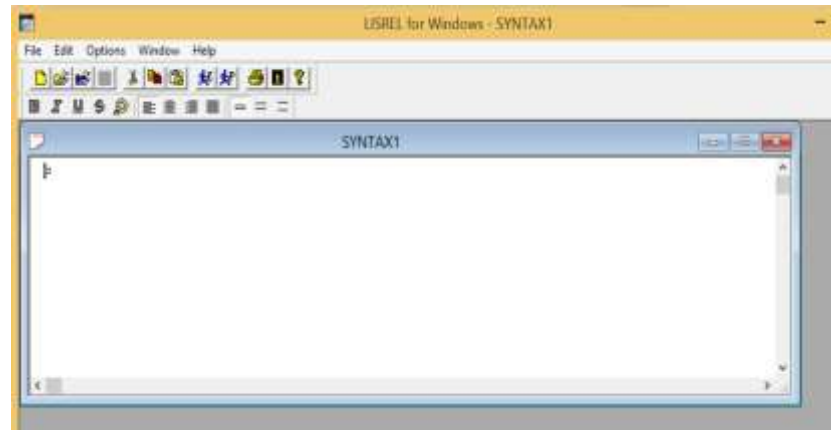
Gambar 2.5 Submenu Program LISREL

Berikut ini akan dijelaskan fungsi submenu dari program LISREL.

1. Menu Syntax Only

Menu ini berfungsi untuk menuliskan berbagai syntax program LISREL, seperti LISREL Project atau SIMPLIS Project. Untuk mengaktifkan menu

tersebut klik File → klik Syntax Only → OK. Maka dilayar akan muncul editor syntax only pada Gambar 2.6.

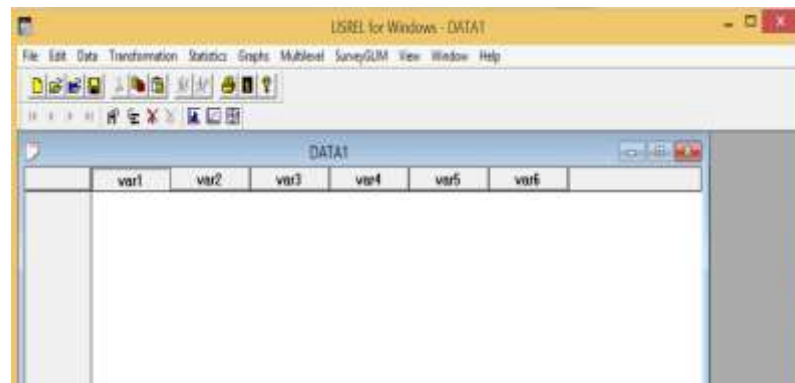


Gambar 2.6 Editor Syntax Only

2. Menu PRELIS Data

Menu ini merupakan menu untuk menginputkan data yang fungsinya mirip dengan worksheet pada Microsoft Excel atau SPSS. Setelah data di inputkan, melalui worksheet PRELIS, maka data tersebut dapat diolah dengan berbagai perhitungan statistik yang diperlukan. PRELIS sendiri merupakan singkatan dari *Preprocessor of LISREL*. Jadi selain input LISREL berupa matriks korelasi atau matriks kovarian, input data LISREL juga dapat menggunakan data mentah (*raw data*) dari PRELIS. Untuk membuka menu PRELIS langkah-langkahnya adalah:

- a. Klik File → New → PRELIS Data → OK → Data → Insert Variable
- b. Ketikkan jumlah variabel yang akan diestimasi (misal 6).



Gambar 2.7 Cel PRELIS Data

- c. Terlihat nama variabel masih default LISREL. Nama variabel dapat diubah dengan nama sesuai keinginan (misal X1,X2,X3,X4,X5 dan X6). Caranya adalah klik Data → Define Variabel → Var1 → Rename → Ketikkan nama variabel → OK (langkah diulang untuk mengganti semua variabel).
- d. Langkah selanjutnya adalah menginputkan data mentah pada cel masing-masing variabel.
- e. Setelah input data selesai, definisikan jenis data sebelum diolah sebab LISREL memerlukan variabel katogorikal yang terdistribusi secara normal dapat dianggap sebagai data kontinu. Langkah-langkahnya adalah klik Data → Define Variable → klik continuous → OK.
- f. Setelah selesai simpan file. LISREL akan secara otomatis menyimpan file dengan ekstensi “psf”. Dengan demikian file tersebut siap diolah.

3. Menu SIMPLIS Project

SIMPLIS Project adalah template atau editor untuk menuliskan syntax program khusus untuk bahasa SIMPLIS. Menu SIMPLIS Project berfungsi untuk menuliskan syntax program yang lebih interaktif dengan editor yang lebih lengkap dibanding dengan editor *syntax only*. Oleh karena itu, bagi

para pemula yang akan menganalisis data *path analysis* disarankan untuk menggunakan menu SIMPLIS Project ini. Untuk membuka template SIMPLIS Project langkah-langkahnya adalah klik File → New → klik SIMPLIS Project → OK. Maka editor SIMPLIS akan terbuka seperti pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Editor SIMPLIS Project

4. Menu LISREL Project

LISREL Project adalah menu template untuk menuliskan program khusus menggunakan bahasa pemrograman LISREL. Bagi pemula, bahasa pemrograman LISREL akan sedikit sulit karena bahasa pemrogramannya kurang umum dibandingkan dengan SIMPLIS. Untuk mengaktifkan menu LISREL Project ini langkah-langkahnya adalah klik File → New → klik LISREL Project → OK.

5. Menu *Path Diagram* / Diagram Jalur

Menu diagram jalur adalah fasilitas yang digunakan untuk memvisualisasikan model hubungan antarvariabel lengkap dengan koefisien pengaruh hasil analisis LISREL. File yang sudah disimpan melalui PRELIS dapat digunakan sebagai data input. Kemudian pada template *path diagram* gambar diagram jalur sebagai model penelitian yang akan dianalisis. Setelah diagram jalur dipetakan dengan

benar, langkah selanjutnya adalah menjalankan (*Run*) LISREL, maka diagram jalur sudah dibuat telah lengkap dengan koefisien jalurnya.

2.12 Kerangka Pemikiran

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan dana alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, 2007).

1) Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatan.

Penelitian tentang Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Coelho (2012) menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan dapat diketahui realisasi APBD mempunyai korelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa setiap kenaikan sebesar 1% pada APBD masing-masing kabupaten/kota maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,74% pada Kabupaten Bitung, sebesar 0,94 % pada Kabupaten Bolaang Mongondouw dan sebesar 0,69% pada Kabupaten Minahasa.

Menurut penelitian Setiawati (2007) menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengukuran secara tidak langsung PAD terhadap

pengangguran sebesar 16,95% sedangkan DAU terhadap pengangguran sebesar 8,9%.

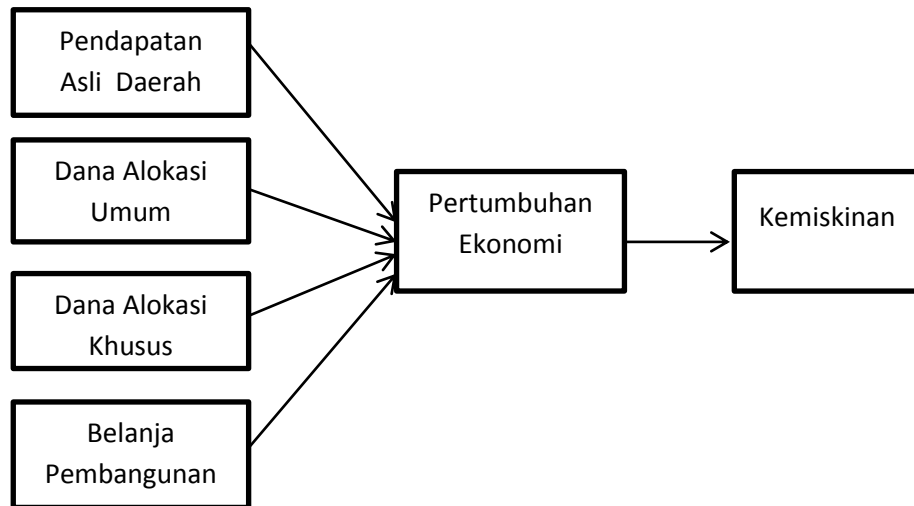
2) Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996: 10) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan.

Penelitian tentang Pengaruh Realisasi APBD terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Coelho (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh linear Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan. Dalam perhitungan menggunakan program SPSS menunjukkan adanya Pengaruh linier antara Variabel APBD terhadap Variabel Kemiskinan. Dimana dapat dilihat yang mempunyai pengaruh linear hanya di kota Bitung. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat signifikansi di bawah 5% hanya ada Kota Bitung, sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak memberi

pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten kota masing-masing.



Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran

2.13 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antar variabel eksogen dan variabel endogen. Dimana Hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H_1) merupakan hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh.

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini antara lain:

- a. Terdapat pengaruh langsung positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Terdapat pengaruh langsung positif Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- c. Terdapat pengaruh langsung positif Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- d. Terdapat pengaruh langsung positif Belanja Pembangunan (BP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- e. Terdapat pengaruh langsung positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.
- f. Terdapat pengaruh tidak langsung positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.
- g. Terdapat pengaruh tidak langsung positif Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.
- h. Terdapat pengaruh tidak langsung positif Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.
- i. Terdapat pengaruh tidak langsung positif Biaya Pembangunan terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh langsung positif PAD dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien jalur PAD sebesar 0,28 dan nilai koefisien jalur DAK sebesar 0,38, sedangkan DAU dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Tidak terdapat pengaruh langsung positif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan diperoleh nilai koefisien jalur pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar -0,022.
3. PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan sebagai bentuk realisasi APBD tidak menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung positif terhadap kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung positif realisasi APBD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai *intervening variable* / variabel perantara. Pengaruh tidak langsung PAD terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0,01 , pengaruh tidak langsung DAU terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01,

pengaruh tidak langsung DAK terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,01$, dan pengaruh tidak langsung Belanja Pembangunan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar $0,00$.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap hasil penelitian yang dapat diberikan antara lain:

1. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kedua sektor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintah dapat mengatur dan merealisasikan pendapatan-pendapatan yang diterima pemerintah dengan cara melakukan pembangunan serta mengembangkan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil penelitian, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Pembangunan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih memanfaatkan secara maksimal dana yang diperoleh dan dapat merealisasikan APBD melalui belanja pembangunan tersebut sehingga otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara merata baik di perkotaan maupun pedesaan.

3. Jika melihat hasil koefisien jalur masih relatif kecil, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain diluar dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini dan menambah jumlah sampel penelitian menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Aisyah, N. Keterkaitan antara indikator pembangunan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam perekonomian Indonesia analisis antar wilayah. *Skripsi Fakultas ekonomi dan manajemen*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Arumsari, D., Khafid, M., & DWP, S. (2015). Pengaruh Tingkat Kecerdasan, Motivasi, Tingkat Sosial Ekonomi Dan Kemampuan Adaptasi Lingkungan Siswa Sebagai Variabel Intervening Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Kelas X Sma Negeri 1 Mranggen Tahun 2014. *Journal of Economic Education*.
- Astuti, F. P., Anisykurillah, I., & Murtini, H. (2014). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal 4*.
- Coelho, A. (2012). Pengaruh Kepuasan Gaji pada Keinginan untuk Pindah dengan Konflik Pekerjaan Keluarga sebagai Pemediasi. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1-19.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Debby Ch Rotinsulu, A. R. (2012). Analisis Dampak Anggaran dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 30-36.
- Einarsen, S., Skogstad, A., Rorvik, E., Lande, A. B., & Nielsen, M. B. (2016). Climate for conflict management, exposure to workplace Bullting and Work Engagement : a moderated mediation analysis. *The International Journal of Human Resource Management*, 1-21.
- Familiar, K., & Maftukhah, I. (2015). Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan. *Management Analysis Journal 4*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. (2016). *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, I. (2005). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif) Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhingan, M. (2000). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, edisi pertama*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Kusumadewi, D. A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 67-80.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mawarni, Darwanism, & Abdullah, S. (2013). Peengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kab/Kota di Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 80-90.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Riadi, E. (2013). *Aplikasi Lisrel untuk Penelitian Analisis Jalur*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rohmah, I. L., & Wahyudin, A. (2015). Pengaruh Environmental Performance Terhadap Economic Performance Dengan Environmental Disclosure Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Analysis Jurnal 4*.
- Saleh, S. (2002). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 87-102.
- Sapariyah. (2007). Path Analysis Sebagai Salah Satu Sarana Statistik Dalam Penelitian Pengambilan Keputusan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 2 No.1.
- Sarwono, J. (2012). *PATH ANALYSIS Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Schimmenti, A., Passanisi, A., Caretti, V., Marca, L. L., Granieri, A., Lacolino, C., et al. (2015). Traumatic experiences, alexithymia, and Internet addiction symptoms among late adolescents: A moderated mediation analysis. *Additive Behaviors*, 1-7.

- Setiawati, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomidan pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 211-228.
- Sudarmanto, R. (2005). *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2004). *Statistika untuk Penelitian Cetakan keenam*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, S. (1991). *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 121-129.
- Syaifuddin, A. F. (2005). Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian Kasus di Jakarta. *Antropologi Indonesia*, Vol 29 No.3.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pinjaman Simpanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.